



BAB VII

KESIMPULAN IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Dalam bab penutup ini akan menyajikan tiga masalah pokok, yaitu kesimpulan, implikasi dan rekomendasi hasil penelitian.

A. Kesimpulan Hasil Penelitian.

Sesuai dengan fokus permasalahan penelitian, maka kesimpulan penelitian bertolak dari tiga masalah pokok yaitu bagaimana prosedur penyusunan Renstra, pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan tersebut serta upaya Badandiklatda dalam memposisikan stakeholder.

Untuk lebih mempertajam kesimpulan ini, akan dikembangkan menjadi beberapa point berikut ini :

1. Model yang dikembangkan dalam penyusunan perencanaan strategik pendidikan dan pelatihan aparatur pada Badandiklatda tahun 2000-2005, mengacu kepada model LAN RI dan BPKP. Prosedur yang ditempuh oleh team Renstra yang dibentuk oleh SK Kabandiklatda No. 803.8/1502/Perencanaan/Badandiklatda/01 adalah : (1) Menetapkan misi. Visi dan nilai/value; (2) Analisis lingkungan strategik internal dan eksternal serta menetapkan strategi dan asumsi; (3) Menetapkan tujuan dan sasaran; (4) Menetapkan cara-cara pencapaian tujuan yaitu menetapkan kebijakan, program dan kegiatan.

2. Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, ditetapkan kekuatan Badandiklatda adalah : (1) Tersedianya jumlah pegawai yang memadai; (2) Memiliki pengalaman yang cukup dalam penyelenggaraan kediklatan aparatur; (3) Jumlah widyaiswara yang memadai; (4) Adanya motivasi dan dedikasi kerja pegawai; (5) Adanya Perda No. 16 tahun 2000. Adapun kelemahan yang terjadi dalam organisasi adalah : (a) Kurangnya pegawai yang

berkualifikasi pendidikan di bidang kediklatan; (b) Belum tersusunnya Need Assesment yang lengkap; (c) Belum tersedianya jaringan sistem informasi manajemen kediklatan; (d) Anggaran yang tersedia belum secara proporsional menunjang tugas pokok dan fungsi Badandiklatda, (e) Fasilitas pendidikan dan pelatihan belum optimal.

Peluang yang dimiliki Badandiklatda meliputi : (1) Adanya kebutuhan kualitas pelayanan aparatur; (2) Adanya kebijakan diklat satu pintu; (3) Tersedianya sasaran (Enrollment) diklat yang jelas; (4) Adanya Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan; (5) Adanya Peraturan Perundangan tentang kediklatan; (6) Adanya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999; (7) Adanya Lembaga Pembina dan Pengendali diklat.

Adapun tantangan yang harus dihadapi adalah : (1) Adanya kegiatan diklat aparatur yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah/Dinas/Badan/Lembaga yang tidak dikoordinasikan oleh Badandiklatda; (2) Pemanfaatan alumni diklat yang belum optimal; (3) Banyaknya lembaga-lembaga diklat yang terakreditasi.

3. Dalam proses penyusunan perencanaan strategik diklat aparatur pada Badandiklatda hanya melibatkan stakeholder internal yang terdiri dari para pejabat struktural, pejabat fungsional widyaiswara dan staf yang potensial. Keterlibatan BPKP yang diundang khusus oleh Badandiklatda karena keterkaitannya dengan Inpres No. 7 tahun 1999 tentang AKIP, dimana BPKP merupakan konseptor utama dalam penyusunan Inpres tersebut.

4. Pihak-pihak yang berkepentingan yang bersifat eksternal dan sudah jelas tingkat kepentingan dan keterdugaannya seperti LAN dan Biro Kepegawaian Setda Propinsi Jawa Barat masih belum dilibatkan, padahal kedua lembaga ini sebagai stakeholder kunci terutama dalam pengembangan visi, misi dan tujuan.

5. Dalam kaitannya dengan analisis posisi stakeholder, Badandiklatda belum berbuat banyak, sehingga keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyusunan Renstra belum dilakukan secara proporsional. Hal ini otomatis berpengaruh kepada kualitas dan kuantitas informasi yang diperoleh oleh team Renstra, pada gilirannya berpengaruh kepada kualitas Renstra itu sendiri.

6. Berbagai kendala yang dihadapi oleh team Renstra dalam proses penyusunan antara lain, (1) Pejabat Struktural maupun fungsional Widyaswara banyak yang belum berpengalaman; (2) Tugas pokok dan fungsi Bandiklatda belum jelas, karena masih dalam proses penyusunan; (3) Keterbatasan team tentang pemahaman akan Renstra; (4) Keterbatasan informasi karena masing-masing dinas/Instansi secara simultan menyusun Renstra.

7. Hasil analisis SWOT diperoleh gambaran bahwa kelemahan kunci yang berakibat kurang berkualitasnya substansi renstra Badandiklatda adalah ketidakterlibatannya stakeholder eksternal kunci yaitu Biro Kepegawaian Setda Prop Jawa Barat dan Instansi pembina yaitu LAN RI perwakilan Jawa Barat serta instansi pengendali yaitu BKN Jawa Barat

B. Implikasi Hasil Penelitian.

Berdasarkan kesimpulan di atas secara umum dapat dikatakan bahwa dalam berbagai aspek yang menjadi fokus penelitian dirasakan masih perlu mendapat penyempurnaan lebih lanjut. Hal ini seyogyanya dilakukan oleh Bandiklatda agar hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi keberadaan Bandiklatda di masa mendatang.

Pertama, kegiatan diklat aparatur merupakan kegiatan pemerintah yang sangat Strategis dalam mewujudkan 'good governance'. Akan tetapi kegiatan ini sangat kompleks dan melibatkan stakeholder dari berbagai fungsi dan disiplin Ilmu Pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian dalam proses penyusunan Rencana Strategik diklat aparatur keterlibatan stakeholder internal maupun eksternal yang memiliki posisi kunci tidak bisa di tawar lagi. Oleh karena itu dituntut kejelian Bandiklatda dalam menganalisis posisi stakeholder sebelum proses penyusunan Renstra tersebut dimulai.

Kedua, penetapan visi Badandiklatda sangat tergantung pada proses dan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal. Melalui kegiatan analisis ini visi

akan lebih realistic, credible dan attractive. Kelemahan dalam menetapkan visi akan berakibat langsung terhadap penentuan misi, strategi, program dan kegiatan.

Menurut hemat penulis visi yang realistic adalah “Terwujudnya manajemen diklat yang profesional dalam mendukung terciptanya good governance”.

Dengan terfokusnya visi Badandiklatda pada aspek manajemen kediklatan maka kebijakan-kebijakan dan strategi diarahkan kepada terwujudnya manajemen tersebut, antara lain : (1) Mempersiapkan aparatur diklat yang profesional; (2) Meningkatkan kualitas PBM melalui pengembangan kemampuan widyaiswara, pengembangan strategi pembelajaran, sumber belajar dan sarana/media pembelajaran; (3) Mengembangkan sistem informasi kediklatan; (4) Mengembangkan paket modul-modul pelatihan yang relevan dengan tuntutan dan kebutuhan melalui proses Analisis Kebutuhan Diklat (AKD); (5) Menyiapkan sarana dan prasarana diklat yang memadai.

C. Rekomendasi Hasil Penelitian.

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi dari hasil penelitian, penulis merasa perlu untuk menyampaikan rekomendasi yang ditujukan kepada Badandiklatda sebagai berikut :

Pertama : Perencanaan strategik pada dasarnya adalah proses dalam pengambilan keputusan untuk masa mendatang dengan demikian tidak menutup kemungkinan untuk diadakan revisi atau perbaikan kearah penyempurnaan atau menjawab tantangan dan atau kebutuhan lingkungan. Dalam hubungannya dengan perencanaan strategik Badandiklatda perlu melakukan pengkajian ulang, dimana dalam proses penyusunan perencanaan strategik didahului dengan melakukan analisi posisi stakeholder sehingga team renstra terdiri dari stakeholder kunci baik internal maupun eksternal. Model hipotetik yang dapat dikembangkan seperti yang dikemukakan oleh Abin Syamsudin.

Kedua : Dalam era Otonomi Daerah dengan titik berat pada masyarakat hukum Kabupaten/Kota, dalam hal ini Pemerintah Propinsi lebih berperan memberikan fasilitasi dan pembinaan. Demikian pula halnya dalam bidang pendidikan dan pelatihan aparatur, Badandiklatda bukan hanya berfungsi sebagai penyelenggara diklat, tetapi lebih mengarah kepada upaya memfasilitasi kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk hal tersebut berbagai kegiatan yang seyogyanya dilaksanakan oleh Badandiklatda adalah :

a. Membina manajemen kediklatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi : Pembinaan kelembagaan, pembinaan SDM kediklatan termasuk didalamnya para widyaiswara, penyusunan program diklat yang relevan dengan kebutuhan di lapangan. Dalam hal ini aparatur kediklatan pada pemerintah Kabupaten/Kota perlu dibekali pelatihan TOT, MOT dan TOC.

b. Menganalisis kebutuhan diklat untuk masing-masing Dinas/Badan dan Lembaga. Melalui kegiatan ini diharapkan Badandiklatda dapat memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam penyusunan berbagai kurikulum yang berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan kongkrit di lapangan.

Untuk terselenggaranya kegiatan-kegiatan tersebut, kepada Badandiklatda Propinsi Jawa Barat disarankan untuk :

1. Lebih meningkatkan profesionalisme para pejabat dan pelaksana diklat dengan memperbanyak kesempatan kepada mereka untuk tugas atau ijin belajar ke S1 sampai dengan S3 pada Universitas Pendidikan.
2. Membuat jejaring kerja (net working) dengan lembaga-lembaga Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta, Pusat-Pusat Kajian Balai-Balai Latihan Pemerintah Pusat terutama dalam penyusunan kurikulum dan modul-modul pelatihan yang relevan dengan tuntutan dan kebutuhan di lapangan.

Ketiga : Badandiklatda sebagai satu-satunya lembaga yang mengelola pendidikan dan pelatihan aparatur di tingkat Propinsi Jawa Barat yang berfungsi sebagai “agent of change” dituntut untuk menyelenggarakan manajemen diklat

secara profesional. Salah satu syarat yang dibutuhkan adalah didukung oleh informasi yang lengkap dan akurat dan dikelola secara profesional.

Untuk itu seyogyanya Badandiklatda sudah mengaplikasikan sistem informasi manajemen kediklatan yang profesional. Menurut hemat penulis hal ini sangat memungkinkan karena baik SDM, anggaran maupun sarana cukup mendukung. Kelengkapan dan keakuratan informasi akan sangat memberikan kontribusi besar terutama terhadap proses penyusunan rencana strategik diklat.



